

## **Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Program Pengadaan Ambulance Di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo**

**Fatmasari<sup>1\*</sup>, Muhammadiyah<sup>2</sup>, Anwar Parawangi<sup>3</sup>**

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study purposed to determine the effectiveness of the Village Fund Allocation in the Ambulance Procurement Program in Majauleng District, Wajo Regency. The number of informants in this study was 13 people. This study used the Budiani theory. This study used descriptive qualitative research. The results of this study on indicators of program effectiveness had been categorized quite well because they were running well. The accuracy of the targets of government programs with a budget that had been set in accordance with the main target of the community. The socialization carried out by the government went well, the dissemination was directly or in writing on the information board. The main objective of the holding of the program was the improvement in the field of health for the community, achievement was carried out with good cooperation for the community and the government was very necessary in achieving the goals to be achieved. Monitoring was carried out to see the success of the programs run by the government. Monitor in terms of service to the community and usedm in the community.*

**Keywords:** *effectiveness, village fund allocation, ambulance procurement*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Program Pengadaan Ambulance di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 13 orang. Penelitian ini menggunakan teori Budiani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian indikator efektivitas program sudah dikategorikan cukup baik karena berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ketepatan sasaran program pemerintah dengan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran utamanya yaitu masyarakat. Sosialisasi dilakukan pemerintah berjalan dengan baik, sosialisasi secara penyampaian langsung maupun secara tertulis di papan informasi. Tujuan utama dari diadakannya program yaitu peningkatan di bidang kesehatan untuk masyarakat, pencapaian dilakukan dengan kerjasama yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pemantauan dilakukan untuk melihat keberhasilan dari program yang dijalankan pemerintah. Memantau dari segi pelayanan ke masyarakat dan penggunaan di masyarakat.

**Kata Kunci:** efektivitas, alokasi dana desa, pengadaan ambulance

---

\* fatmasari@gmail.com

## PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan masyarakat umum yang mempunyai batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berasaskan prakarsa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Pembentukan Pemerintahan Desa itu sendiri dipilih langsung oleh masyarakat desa. Pemerintah Desa yang berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya karena sudah dipilih langsung menjadi wakil mereka, salah satunya tentang transportasi layanan kesehatan seperti ambulance desa.

Setiap manusia memiliki perlindungan kesehatan karena Negara atau daerah yang kuat didukung oleh masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani (Hanif Nurcholis, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo terus berusaha memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di desa-desa. Pengadaan kendaraan bertajuk “Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa”. Pemerintah berharap program besar ini menyentuh masyarakat pedesaan secara menyeluruh. ADD 2017 diprioritaskan disalurkan ke bidang kesehatan dengan

membagikan mobil unit kesehatan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Wajo.

Program tersebut perlu diusahakan agar dapat menjangkau kelompok sasaran yang diinginkan dan memperoleh partisipasi masyarakat. Lebih dari itu, karena pelaksanaan program pelayanan sosial melibatkan berbagai pihak terkait, maka agar hasilnya semakin optimal perlu juga digalang kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. (Soetomo, 2010). Agar pelayanan sosial ini dapat menjangkau masyarakat khususnya lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, maka perlu dilakukan berbagai karakteristik ke dalam berbagai bentuk pelayanan sosial. Agar program pelayanan sosial yang diselenggarakan cukup efektif menyentuh kesejahteraan masyarakat, maka program yang dirancang dan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan aturan hukum yang terkait dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peruntukan untuk masyarakat di desa-desa yang ada Kecamatan Majauleng, masyarakat yang sakit yang sangat membutuhkan mobil layanan kesehatan sewaktu-waktu membutuhkan, masyarakat yang tidak memiliki kendaraan bahkan untuk ibu hamil diharapkan mampu memberikan pertolongan pertama untuk menuju puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Terkhusus masyarakat yang memang tinggal di desa-desa pelosok. Program ini dapat sangat membantu masyarakat desa.

Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Wajo harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu (a) pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. (b) seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan

desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. (c) seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum. (d) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. (e) ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Harbani Pasolog (2007) berpendapat bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” yang digunakan dalam istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dilihat sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas ialah suatu proses kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah direncanakan. Persepsi tentang efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah kedalam berbagai aktivitas kehidupan manusia agar mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Memang secara alamiah dalam realitas bahwa apa yang kita

bayangkan sebelumnya itu mungkin dapat terjadi, tetapi mungkin juga tidak, namun kalau memang telah secara pasti akan terjadi sesuatu. Oleh sebab itu, untuk menentukan keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai ke Negara pun harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau tugas yang dibebankan.

Pendekatan efektivitas sebagaimana kriteria atau ukuran dalam pencapaian tujuan efektif atau tidak, dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu melihat kejelasan yang hendak dicapai yang dimaksudkan agar program yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah terarah dan keinginan dapat tercapai. Kemudian kejelasan strategi pencapaian tujuan, dilihat dari strategi merupakan dimana untuk mencapai sasaran-sasaran telah melewati berbagai upaya yang telah ditentukan. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dimana memilah dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang matang, yaitu penentuan rencana jangka panjang dengan pertimbangan

segala hal yang mungkin akan terjadi sesuai dengan keadaan lapangan. Penyusunan program yang tepat, yaitu penyusunan atau pembagian kerja untuk pencapaian tujuan yang lebih efisien, jika tidak pelaksana akan terombang-ambing dan tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pencapaian sasaran serta sistem pengawasan dan pengendalian guna mengawasi keberlangsungan kerja maupun menanggulangi masalah yang terjadi.

Lubis Hari dan Martini Hussein (1987) mengatakan dalam pengukuran efektivitas, yaitu dengan melakukan pendekatan sumber dimana mengukur efektivitas dari input. Keberhasilan suatu organisasi dapat diperoleh dengan memenuhi kebutuhan organisasi yang didalamnya terdapat sumber daya. Pendekatan proses merupakan pendekatan untuk menilai keefektivitasan suatu pelaksanaan program atau mekanisme organisasi. Pendekatan sasaran untuk mengukur keberhasilan dilihat dari pusat output untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana.

Menurut Ni Wayan Budiani (2009) dalam mengukur efektivitas yaitu dengan melihat ketepatan sasaran

program yaitu sejauh mana program tepat yang ditentukan sebelumnya. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. Pemantauan program, merupakan kegiatan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk mengontrol program.

Sedangkan menurut Richard M. Steers (1985) mengungkapkan bahwa ukuran efektivitas ialah dengan pencapaian tujuan dimana proses dipandang sebagai upaya pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dapat dicapai melalui beberapa pencapaian dan tahapan periode. Pencapaian tujuan memiliki faktor dimana diantaranya ialah sasaran dan batasan waktu yang merupakan target pemerintah. Integrasi yaitu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan pengukuran dari tingkat kemampuan tersebut dan adaptasi yaitu penyesuaian diri.

Menurut Handoko (2000) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian konsep efektivitas tidak terlepas dari sejauh mana keberhasilan seseorang dalam mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Jadi efektivitas program merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengukur apakah suatu program telah mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Salah satu aspek yang bisa digunakan sebagai untuk mengukur apakah suatu program telah berjalan dengan efektif atau tidak adalah pemenuhan tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Untuk mencapai tujuannya pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat, maka masyarakat harus memiliki kesamaan pemikiran dengan pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Sistem control Untuk melihat sistem kerja program harus memiliki sistem control yang berfungsi untuk memonitoring berjalan dengan tepat sasaran program dari pemerintah. Akuntabilitas dan tanggungjawab. Kinerja dapat diukur dari tingkat akuntabilitas dan daya tanggapnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Keberhasilan suatu program atau kebijakan ditentukan oleh keefektivitasan atau kebijakan ditentukan. Suatu program atau kebijakan sangat diharapkan mampu memberikan suatu perubahan yang baik untuk masyarakat. Yang memiliki multifungsional yang baik dan tepat. Karena suatu kondisi program atau kebijakan sangat didominasi dari keefektivitasan berjalannya program atau kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Program Pengadaan Ambulance di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo“

## **METODE PENELITIAN**

Waktu penelitian dilakukan selama bulan Juni s/d Agustus 2019. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang diperoleh melalui hasil pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber dengan instrument itu. Dengan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati yang bertujuan untuk mengumpulkan data

dan informasi dari sejumlah informan yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan masalah penelitian. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari sebuah pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun yang menjadi informan penelitian pada penelitian ini adalah Kepala Camat Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Kepala Desa Watan Rumpia, Kepala Desa Liu, Kepala Desa Tengnga, Kepala Desa Tellu Limpoe, Kepala Desa Laerung, Sekdes Desa Rumpia, Sekdes Desa Tua, Masyarakat Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang terkait dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisa data yang digunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk data yang digunakan tiga triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kecamatan Majauleng merupakan salah satu Kecamatan yang ada di

Kabupaten Wajo yang memiliki luas 225,92 km<sup>2</sup>. Kecamatan Majauleng dengan Ibu Kota Paria adalah salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Wajo yang terletak di sebelah utara ibu kota kabupaten Wajo, dengan batas wilayah Sebelah utara Berbatasan dengan kec. Gilireng dan Sajoanging, sebelah selatan Berbatasan dengan kec. Bola dan Pammana, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanasitolo, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Penrang. Luas wilayah Secara administratif, kecamatan Majauleng adalah salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten Wajo dengan luas wilayah 225,92 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 14 desa dan 4 kelurahan.

Salah satu program pemerintah Kabupaten Wajo yaitu tentang peningkatan kesehatan masyarakat untuk kesejahteraan sosial dengan diadakannya ambulance gratis di setiap desa yang ada di Kecamatan Majauleng. Berhubung beberapa desa-desa yang ada di Kecamatan Majauleng berada di bagian terpelosok yang jauh dari Rumah Sakit maupun Puskesmas. Hal ini berdampak dengan keterlambatan pertolongan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan adanya

program yang dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses masyarakat pergi ke Puskesmas atau Rumah Sakit.

Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo memiliki 14 desa yang ingin direalisasikan program pengadaan ambulance di setiap desa. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta menekan angka kematian dikarenakan keterlambatan penanganan akibat tidak adanya kendaraan terutama dibagian pelosok desa. Program yang berasal dari program Kabupaten Wajo pada tahun 2017 dirancang program berjalan hingga sekarang. Dalam pengadaan di setiap desa perlu tahap-tahap perencanaan yang tidak sekaligus dilakukan dan direalisasikan di setiap desa khususnya di Kecamatan Majauleng.

Efektivitas program dalam pengadaan ambulance di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Layanannya sendiri diperuntukkan untuk masyarakat yang dimana masyarakat dapat mengambil mobil layanan kesehatan tersebut di Kantor Kepala Desa ataupun di rumah Kepala Desa. Mobil layanan kesehatan untuk masyarakat ini juga dilengkapi dengan penanda untuk mengetahui mobil

ambulance yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dari pemerintah.

Saat ini memang hanya sekitar delapan desa yang terealisasi pengadaan ambulance di Kecamatan Majauleng. Masih ada sekitar enam lagi yang belum terealisasi. Setiap tahapan dilakukan pemerintah pusat agar terealisasi merata di desa-desa yang ada di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 5 ayat (1) “ setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan “ dengan ini pemerintah Kecamatan Majauleng mengusahakan terealisasi di setiap desa yang ada di Kecamatan Majauleng di 2019 dengan secara bertahap.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan hasil pemikiran Budiani untuk mengetahui Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Program Pengadaan Ambulance di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo melalui indikator-indikator dalam mengukur efektivitas yang meliputi ; (1) ketepatan sasaran, (2) sosialisasi, (3) tujuan program, dan (4) pemantauan.

### **Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran yang dimaksud ketepatan penetapan anggaran dari Pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam program pengadaan ambulance di desa-desa yang ada di Kecamatan Majauleng. Kelompok sasarannya adalah masyarakat. suatu program dapat dikatakan berjalan dengan baik jika program tersebut sudah berjalan dengan baik jika program tersebut sudah dapat bermanfaat bagi penggunanya. Ketepatan sasaran melihat bagaimana program yang dijalankan pemerintah tepat pada sasaran atau kepada masyarakat. Dalam mengukur ketepatan sasaran dilakukan dengan adanya laporan pertanggungjawaban dalam setiap pencairan dana atau LPJ untuk kemudian mengalokasikan dana tersebut untuk pengadaan mobil ambulance yang ada di desa-desa di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Maksudnya dari pemerintah Kecamatan dalam mengukur atau melihat ketepatan sasaran baik dana maupun pengadaan mobil ambulance dilakukan dengan adanya laporan pertanggungjawaban pencairan dana dan melihat dana yang di cairkan benar-benar diperuntukkan untuk pengadaan mobil ambulance, karena sangat



dibutuhkan bukti fisik untuk mengukur ketepatan sasaran oleh pemerintah kecamatan.

Namun lain halnya dengan pemerintah desa dalam mengukur ketepatan sasaran dengan tetap penggunaan mengacu pada penggunaannya dan peruntukan kepada masyarakat yang khususnya masyarakat yang sakit atau ibu hamil dan ibu melahirkan. Pada tujuan utama dalam pengadaan mobil ambulance memang ditujukan kepada kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dapat pula dengan menelephone call centre yang telah disediakan disetiap mobil ambulance yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal guna untuk menekan angka kematian dikarenakan keterlambatan ke tempat layanan kesehatan. suatu program dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila tepat sasaran dimana khususnya masyarakat guna diharapkan mampu meminimalkan rasa kecemasan masyarakat dan menjadi salah satu mewujudkan pemberian layanan kesehatan yan merata untu masyarakat desa di Kecamatan Majauleng.

### **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan sebuah

informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya program yang dijalankan pemerintah di bidang kesehatan. seperti halnya sosialisasi adanya mobil ambulance yang disediakan pemerintah untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Sosialisasi dilakukan dengan sistem pemberitahuan atau pengumuman. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dilakukan satu tahun sebelum pengadaan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) dan kemudian Rencana Kerja Pembangunan (RKP) karena di RKP tercantum dana desa maupun alokasi dana desa melalui musyawarah antar kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Maksudnya dalam sosialisasi pemerintah kecamatan melakukan Musrenbang di bulan delapan dimana membahas tentang rencana kerja pembangunan desa untuk tahun berikutnya yang salah satunya yaitu dalam program pengadaan ambulance yang kemudian pemerintah desa melakukan rapat kerja dengan kepala desa serta perwakilan tokoh masyarakat agar mengetahui rencana kerja pemerintah ke depannya, agar masyarakat desa mengetahui dikemana dana desa untuk tahun berikutnya. Sosialisasi pada umumnya

yang resmi dilaksanakan dua kali melalui musrenbang dan rencana pembangunan.

Konsistensi dalam sosialisasi dengan mengumumkan di Masjid setiap hari jumat selain mengumumkan terdapat juga logo di mobil ambulance yang menandakan mobil layanan kesehatan milik masyarakat. Selain itu juga, kepala desa menghadiri perkumpulan masyarakat saat berbincang-bincang sekaligus memberi tahu atau mengsosialisasikan tentang adanya mobil ambulance desa yang disediakan pemerintah. Dilakukan pula dengan pemberian informasi memberikan informasi di papan pengumuman di kantor desa dan tempat papan pengumuman di desa yang bisa dilihat oleh semua masyarakat dan juga dapat dilakukan dengan menelpon kepala desa untuk memakai mobil ambulance karena sudah tercantum di mobil ambulance tersebut dan di papan pengumuman kantor desa.

Meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum mengerti karena faktor usia, namun pembicaraan dari mulut ke mulut dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat yang tidak memahami bahwa disediakan mobil ambulance yang disediakan khusus untuk masyarakat yang membutuhkan

ke tempat layanan kesehatan dan bagi masyarakat yang wilayah atau desanya jauh dari jangkauan puskesmas maupun rumah sakit.

### **Tujuan Program**

Tujuan program itu sendiri merupakan pencapaian ukuran keberhasilan yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh organisasi/pemerintah dalam sebuah program pemerintah. tujuan utama dari diadakannya program yaitu peningkatan di bidang kesehatan untuk masyarakat. Dimana masyarakat tidak menjadi terhambat untuk ke tempat layanan kesehatan dibantu dengan program pengadaan ambulance dan tidak merasa terbebani karena tidak menanggung biaya karena yang disediakan pemerintah untuk masyarakat semua gratis.

Merupakan hal yang harus bagi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat atau membantu dalam bidang kesehatan baik itu juga di bidang umum lainnya dan disisi masyarakat merasa telah terbantu dengan adanya program tersebut tanpa harus mengeluarkan pada saat betul-betul membutuhkan mobil disaat darurat untuk ke rumah sakit apalagi desa-desa yang jauh dari daerah perkotaan. Untuk pencapaian

tujuan dari program dilakukan kerjasama yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

### **Pemantauan**

Pemantauan merupakan kegiatan mengontrol perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sedini mungkin. Dilihat dari dalam hal penggunaan mobil ambulance yang diberikan pemerintah yang merupakan gratis untuk masyarakat baiknya dirawat atau dibersihkan setelah memakainya, tidak dengan mengatakan bahwa merupakan mobil gratis jadi seenaknya dan tidak bertanggungjawab. Pemantauan dilakukan dengan melihat laporan pertanggungjawaban atau terjun langsung melihat pemantauan kegunaan mobil ambulance di masyarakat. Dilihat dari tepatnya sasaran sebuah mobil ambulance desa dapat dipantau bahwa rata-rata sudah baik. Adapun penyimpangan atau penyalahgunaan dari penggunaan mobil layanan kesehatan itu sendiri mungkin karena dibutuhkan pada kebutuhan sosial lainnya.

Adapun pemantauan bagi masyarakat yang ingin menggunakan mobil layanan kesehatan tersebut namun pada saat ingin menggunakan ternyata pihak kepala desa atau keluarganya menggunakan lebih dulu dan penggunaannya pun hanya untuk sekedar jalan-jalan. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan mobil layanan tersebut waktu itu. Hal ini masih sangat perlu perhatian bagi pemerintah untuk melihat penggunaan mobil ambulance desa secara tepat untuk dan bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, agar tidak adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak pemerintah desa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang efektivitas alokasi dana desa dalam pengadaan ambulance di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo maka dapat disimpulkan: (1). Ketepatan sasaran alokasi dana desa dalam pengadaan ambulance, pemerintah sudah memaksimalkan untuk tujuan utama sasaran yang ditujukan kepada masyarakat di bidang kesehatan, meskipun mobil layanan kesehatan ini tidak hanya digunakan untuk kesehatan bahkan digunakan untuk pribadi dari kepala desa dan

dipakai untuk kebutuhan sosial lainnya oleh masyarakat. Namun, pada umumnya pengadaan mobil ambulance ini untuk membantu masyarakat yang untuk sasaran pemerintah sudah tepat. (2). Sosialisasi, sosialisasi dilakukan pemerintah dengan berbagai cara dimulai dari sosialisasi langsung, tertulis maupun yang bersifat pengumuman. Pemerintah daerah bahkan turun langsung mengsosialisasikan ke masyarakat misalnya yang dikemukakan oleh Kepala Desa Tengnga yang mengatakan bahwa pada saat masyarakat kumpul-kumpul disuatu tempat, kepala desa ikut untuk bercerita dengan masyarakat dan disitu disampaikan juga bahwa adanya program pemerintah yaitu mobil ambulance. Selain itu, di sampaikan juga melalui papan pengumuman yang ada di kantor desa, juga dilakukan pengumuman di Masjid di setiap shalat Jumat yang notabennya memang laki-laki tetapi itu sudah menjadi perwakilan dari setiap kepala keluarga mengetahui program ini. Sedangkan sosialisasi dilakukan pada saat rapat disitu masyarakat lebih tahu berapa anggaran untuk pendanaan pengadaan mobil ambulance ini, gunanya untuk masyarakat tahu dibawa kemana dana yang diberikan pemerintah pusat untuk daerahnya. (3). Tujuan program, dimana

sudah jelas tujuan dari program pengadaan mobil ambulance ini untuk meningkatkan keselamatan bagi masyarakat yang sakit dan menekan angka kematian. Dalam tujuan meski tidak selalu mulus tetapi maksimalnya pemerintah sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Meskipun mobil layanan kesehatan ini terkadang digunakan untuk kepentingan sosial lainnya tapi pada dasarnya untuk masyarakat, jika memang tidak ada yang membutuhkan pemerintah daerah memberikan untuk kepentingan sosial lainnya. Meskipun, pada khususnya pengadaan diperuntukkan bagi yang ingin ke tempat layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. (4). Pemantauan, pemerintah pusat melakukan pemantauan kepada pemerintah daerah melalui laporan pertanggung jawaban, sedangkan pemerintah daerah pemantauan yang diberikan kepada masyarakat dengan pemerintah daerah mempercayai sepenuhnya kepada masyarakat untuk menggunakan mobil ambulance asalkan dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Pemantauan harus lebih ditingkatkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terutama bagi masyarakat yang saat benar-benar membutuhkan mobil ambulance desa untuk ke tempat layanan kesehatan,

tidak harus menunggu karena dipergunakan secara pribadi oleh pihak pemerintah desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiani, Ni Wayan. 2009. Efektifitas Dinas Kesehatan Dalam Program Mobil Siaga Desa di Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Vol. 2 No. 1. Unud.
- Handoko. 2003. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung: Jakarta.
- Hari Lubis dan Husaini Martani. 1987. Teori Organisasi Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga: Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Steers, Richard.M. 1985. Efektifitas Organisasi. Jakarta: PPM Erlangga.
- Soetomo. 2010. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian S.P.1978. Manajemen. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD di Kabupaten Wajo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des